

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Efektivitas

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan¹. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan

¹ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3. 19

benar dan memberikan hasil yang bermanfaat². Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

Efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan³. Pasolong (2007) mengemukakan bahwa efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel ini. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Produksi sebagai kriteria yang mengacu pada keluaran, efisiensi sebagai kriteria yang mengacu pada penggunaan sumber daya, kepuasan sebagai kriteria yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan, adaptasi sebagai kriteria yang mengacu pada

² Ibid, h. 4.

³ Asnawi. 2013. Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota

tanggapan organisasi pada perubahan dan kelangsungan hidup sebagai kriteria yang mengacu pada tanggungjawab organisasi terhadap peningkatan SDM⁴.

Efektivitas organisasi dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan melalui pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi⁵. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Organisasi yang memiliki kemampuan lebih besar memiliki kemungkinan untuk mencoba berbagai macam strategis tersebut, sedangkan pada organisasi yang memiliki kemampuan yang lemah tidak memiliki banyak pilihan terhadap strategi tersebut. Namun, pada dasarnya semua organisasi memiliki kesempatan yang sama, hanya tergantung bagaimana tingkat kreatifitas dan kebijakan yang dihasilkan.

2.1.2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau

⁴ Nawawi, Ismail. 2013. Budaya organisasi kepemimpinan dan Kinerja. Jakarta: PT. Fajar Iterpratama Mandiri, hal:2

⁵ Ibid, hal:12

hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu⁶:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

⁶ Ibid, h. 5-6. 20

- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu⁷:

- 1) Produktivitas
- 2) Kemampuan adaptasi kerja
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan berlabar
- 5) Pencarian sumber daya

Indikator untuk mengukur efektivitas program menurut Sutrisno dalam Monica dan Herbasuki yaitu⁸:

⁷ Ibid, h.7

⁸ Monica, P & Herbasuki, N. 2018. Efektivitas Program Bpjs Kesehatan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan Di Puskesmas Srandol) *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*. Jurnal IPEM. Vol 1(2). Hal:4. <http://journal.IPEM.ac.id/index.php/JM/article/view/324/782>

1) Pemahaman program

Pemahaman program dilihat dari sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program.

2) Tepat sasaran

Ketepatan sasaran dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan.

3) Tepat waktu

Ketepatan waktu dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

4) Tercapainya tujuan

Ketercapaian tujuan diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.

5) Perubahan nyata

Perubahan nyata diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat.

2.1.3. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu⁹:

a. Pendekatan sasaran (Goal Approach)

⁹ Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02, h. 8-10

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “Official Goal” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

b. Pendekatan Sumber (System Resource Approach)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena

lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

b. Pendekatan Proses (Internal Process Approach)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

2.2. Konsep Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

a. **Pengertian Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)**

RKP Desa adalah merupakan suatu rencana kerja penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM desa) yang dimana disusun 5 tahun sekali dan dalam masa 5 tahun itu terhitung dari tiap tahun, itulah yang disebut RKP Desa. Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dimana secara umum Perencanaan Pembangunan adalah cara atau metode untuk mencapai sasaran pembangunan

dengan tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan keadaan negara atau daerah yang bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah untuk memotivasi proses pembangunan secara lebih cepat demi mewujudkan masyarakat yang maju, berada, dan sejahtera¹⁰.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No 114 tahun 2014, tentang pedoman perencanaan pembangunan desa (RKP Desa) bahwa dalam penyusunan RKP Desa tidak boleh dilakukan sepihak. Pada pasal 30 disebutkan kepala desa dalam menyusun RKP Desa dengan mengikut sertakan masyarakat desa. Yang dimana musyawarah desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian hasil dari musyawarah desa dijadikan pedoman oleh pemerintah desa dalam menyusun RKP Desa dan daftar usulan desa, apabila daftar usulan tersebut diterima dan disetujui oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota maka akan dimuat dalam RKP Desa berikutnya. Daftar usulan RKP Desa merupakan penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun dan kemudian diusulkan pemerintah desa kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKP Desa biasa juga dibarengi dengan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD), hal ini sangat berkaitan karena rencana kerja apabila tanpa adanya anggaran akan menjadi dokumen belakang¹¹. Selanjutnya dilakukan tahapan sosialisasi kepada masyarakat yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan kewajiban pemerintah. Yang dimana

¹⁰ Sjafrizal. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal:12

¹¹ peraturan menteri dalam negeri No 114 tahun 2014, tentang pedoman perencanaan pembangunan desa (RKP Desa)

perencanaan pembangunan desa yang baik itu dilakukan oleh masyarakatnya sendiri, dikarenakan hanya masyarakat desa itu sendiri yang mengetahui apa masalah yang dihadapi dan mereka pula yang tau apa potensi yang dapat mereka kembangkan dalam wilayah atau daerah mereka karena dalam hal ini masyarakat memiliki hak agar dapat terlibat dalam pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan RKP Desa. Literatur ilmiah yang tersedia memberikan beberapa pengertian tentang perencanaan pembangunan dalam bentuk berbagai definisi.

Menurut Arthur W. Lewis dalam Sjafrizal mendefinisikan perencanaan pembangunan merupakan suatu kumpulan kebijaksanaan dalam rencana pembangunan untuk memotivasi masyarakat dan swasta agar menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif¹². Sedangkan motivasi tersebut diberikan dalam bentuk insentif-insentif ekonomi baik secara mikro/kecil ataupun makro/besar yang dapat mendorong penggunaan sumber daya secara lebih produktif sehingga proses pembangunan akan menjadi lebih meningkat. Sistem perencanaan pembangunan nasional berdasarkan undang-undang nomor 25 Tahun 2004 memberikan otonomi penuh kepada daerah untuk merumuskan lebih lanjut kebijakan perencanaan daerah. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan termasuk sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Perencanaan pembangunan bisa diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau ketetapan-ketetapan yang didasarkan pada kebenaran-kebenaran yang akan digunakan untuk

¹² Sjafrizal, *Op Cit*, hal:14

bahan dalam melaksanakan suatu rangkaian aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (materi) maupun nonfisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai sasaran yang lebih baik¹³.

Perencanaan pembangunan pada hakikatnya adalah merupakan pengawasan dan pengaturan perekonomian dengan terencana oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat demi mencapai suatu tujuan tertentu di dalam batas waktu tertentu pula¹⁴. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) bertujuan untuk pedoman atau dasar kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan di desa, sebagai dasar penyusunan aturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) dan desa memiliki pedoman atau dokumen tentang perencanaan tahunan yang memiliki kekuatan hukum yang tepat. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa RKP Desa merupakan alternatif penjabaran dari RPJM desa yang digagas oleh pemerintah guna memecahkan masalah ekonomi sosial untuk mensejahterakan rakyatnya dan untuk mewujudkan perencanaan desa guna tercapainya pemanfaatan potensi secara efektif, maksimal dan efisien serta ekonomis, dalam rangka pembangunan desa agar dapat menjadi desa yang mandiri, maju dan sejahtera.

Pembangunan adalah suatu usaha atau perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat serta individu-individu di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Sebagai sebuah upaya menuju tercapainya kesejahteraan, masyarakat perdesaan adalah subjek perencanaan pembangunan karena pembangunan mensarankan pelibatan atau

¹³ Bintoro, Tjokroamidjojo. 2014. Pengantar Administrasi pembangunan, LP3ES, Jakarta, hal:34

¹⁴ Sjafrizal, *Op Cit*, hal:16

partisipasi seluruh warga masyarakat sejak pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, sampai pada implementasi, dan pengontrolan kegiatan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya oleh masyarakat¹⁵. Pentingnya program pembangunan yang mengikut sertakan masyarakat merupakan sebuah keadaan rasional dikarenakan masyarakat adalah pihak yang paling memahami permasalahan-permasalahan dan mengetahui kebutuhan pembangunan, dimana dalam hal ini terdapat 5 (lima) tipe penyelesaian yang perlu diformulasikan dalam kebijakan yaitu ¹⁶:

- a. *Inducement*, langkah kebijakan yang bersifat menekan atau membujuk atas isu tertentu.
- b. *Rules*, langkah kebijakan yang mengharuskan pada penciptaan norma-norma dalam bentuk peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh masyarakat;
- c. *Facts*, langkah kebijakan seperti penerapan jalur berita untuk mempersuasi kelompok sasaran agar ingin melakukan sesuatu yang diduga dapat menyelesaikan masalah.
- d. *Right*, langkah kebijakan berupa pemberian tugas-tugas atau hak-hak pada masyarakat.
- e. *Power*, upaya kebijakan berbentuk peningkatan nilai kekuasaan yang melahirkan adanya tuntutan tertentu.

¹⁵ Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit Alfabeta, hal:43

¹⁶ Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media, hal:25

Kelima tipe solusi tersebut merupakan problem solving untuk pemangku kebijakan dalam mengatasi permasalahan -permasalahan publik dalam fase perencanaan pembangunan. Pembangunan melalui landasan partisipasi masyarakat dimaknai sebagai the continued active involvement of citizen in making which affect them (Antoft dan Novackdalam Ahmad Surusi)¹⁷. Prosedur yang berkelanjutan tersebut menjadi sesuatu yang menentukan untuk mendukung kesuksesan tujuan pembangunan dengan masyarakat sebagai aktor perencana.

Perencanaan adalah suatu metode bagaimana memperoleh tujuan sebenarsebenarnya (*Maximum Output*) dengan berbagai sumber yang ada agar lebih efisien dan efektif dan penentuan sasaran yang hendak diperoleh atau yang akan dilaksanakan, bagaimana, kapan, dan oleh siapa. Dari berbagai definisi terkait perencanaan, penulis menyimpulkan bahwa perencanaan menjadi langkah awal dalam melakukan suatu tujuan tertentu yang terkait pemahaman keputusan atau pilihan terkait langkah 31 memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin demi mencapai sasaran tertentu dimasa depan. Dari berbagai definisi tersebut maka bisa diuraikan beberapa komponen fundamental dalam perencanaan yakni sasaran (apa yang hendak dicapai), aktivitas (tindakan-tindakan untuk merealisasikan sasaran), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan)¹⁸.

Perubahan dari suatu keadaan nasional yang lain, yang dianggap lebih baik dan lebih bermakna disebut pembangunan. Disamping itu pembangunan juga

¹⁷ Adisasmita, Rahardjo. 2016. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu; Yogyakarta, hal:17

¹⁸ Daldjoeni dan A. Suyitno. 2014. Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan. LP3ES ; Jakarta, hal:12

iyalah proses multi dimensional yang mengenai perubahan yang penting dalam sistem sosial ekonomi, suatu struktur, tindakan masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, kesenjangan, pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berarti suatu proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan buat memeprbaharui kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam definisi pembangunan para praktisi memberikan berbagai jenis definisi mengenai pembangunan, namun secara umum ada suatu perjanjian bahwa pembangunan ialah proses untuk melaksanakan perubahan. Siagian mendefinisikan terkait bagaimana pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan yang berencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara , dan pemerintah, mengarah modernitas dalam rangka Pembinaan Bangsa (*Nation Building*)¹⁹. Adapun Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui usaha yang dilakukan secara terencana. Usaha untuk mengerti makna dan strategi pembangunan yang benar telah mengaitkan para praktisi dari berbagai disiplin ilmu akibatnya konsep pembangunan harus bisa multi interpretable namun disamping itu pembangunan dapat dipahami sebagai proses multi dimensional dan memuat pergeseran orientasi dan system organisasi sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik²⁰. Todaro melihat pembangunan sebagai proses yang multi dimensional dari tatanan

¹⁹ Sondang P. Siagian. 2016. Sistem Informasi Manajemen, Bumi Aksara. Jakarta, hal:24

²⁰ Kartasasmita Ginanjar. 1995. Pemberdayaan Masyarakat Suatu Tinjauan Administrasi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brwajiya ; Bandung

masyarakat, perkembangan ekonomi, perilaku, kelembagaan, pengangguran, kepincangan dan penghapusan kemiskinan absolute dari masyarakat²¹. Tiga nilai yang membuat tujuan pembangunan adalah²²:

- a. *Live sustainance* atau terpenuhinya kebutuhan pokok manusia berupa sandang, papan, pangan, perlindungan dari ancaman dan kesehatan.
- b. *Self esteem*, kemampuan untuk membentuk diri sendiri.
- c. *Freedom for servitude*, yaitu kemampuan akan memilih secara bebas.

Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan peningkatan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh satu Negara bangsa menuju moderenitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building)²³. Pengertian perencanaan pembangunan bisa dilihat berdasarkan faktor-faktor yang membentuknya yaitu perencanaan dan pembangunan. Perencanaan adalah memilih dan mengaitkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi terkaiti masa yang akan datang dengan jalur menggambarkan dan merumuskan aktivitas yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pembangunan adalah suatu tawaran atau rangkaian usaha peningkatan dan perubahan yang terencana yang dilaksanakan dengan sadar oleh suatu Bangsa Negara dan Pemerintah Modernitas dalam bentuk Pembinaan Bangsa. Definisi lain dari perencanaan adalah menentukan prioritas dan metode atau alternatif untuk mencapai sasaran, pengalokasian sumber daya, bertujuan memperoleh

²¹ Todaro, Michael. P. 2010. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. EdisiKetujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta : Penerbit Erlangga, hal:34

²² Ibid, hal:36

²³ Bintoro, 2012, Pengantar Tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta,hal:15

sasaran, berhubungan dengan masa yang akan datang, serta kegiatan yang berkelanjutan²⁴.

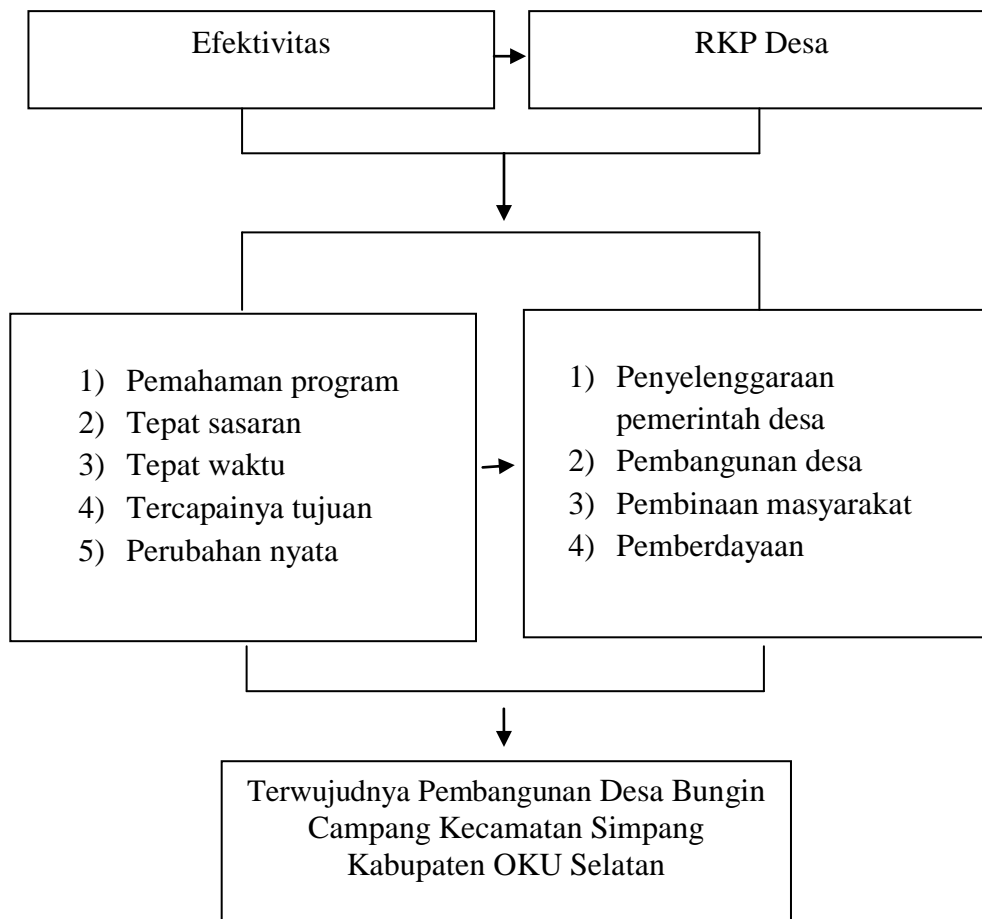
2.5. Kerangka Pikir

Untuk mengukur efektifitas pelaksanaan RKP Desa Bungin Campang dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

1. Pemahaman dalam penelitian ini dilihat dari sejauh mana masyarakat dapat memahami prioritas program dan kegiatan tahunan skala Desa Bungin Campang yang dicantumkan didalam RKP Desa Bungin Campang.
2. Ketepatan sasaran dalam penelitian ini dilihat dari apakah prioritas program dan kegiatan tahunan skala Desa Bungin Campang sudah mencapai sasaran yang diinginkan dan menjadi kenyataan.
3. Ketepatan waktu dalam penelitian ini dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
4. Ketercapaian tujuan dalam penelitian ini diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.
5. Perubahan nyata dalam penelitian ini diukur melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat Desa Bungin Campang.

²⁴ Afifuddin. 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi. Bandung: Alfabeta, hal:3

Maka alur penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 2.1
Kerangka Pikir